

## Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Sentani Kabupaten Jayapura

Hanifah Diah Indryani Rahmawati

Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

E-mail: diahindryni03@gmail.com

\* Corresponding Author



<https://doi.org/>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 05 March 2024

Revised: 11 March 2024

Accepted: 17 March 2025

#### Kata Kunci

PAD, PDRB, Elastisitas

#### Keywords

PAD, PDRB, Elasticity

### ABSTRACT

Tujuan penelitian untuk mengukur elastisitas PAD dengan PDRB dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pendekatan penelitian kuantitatif, menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan cara menghitung rasio elastisitas PAD tahun 2020-2024. Hasil penelitian, menunjukkan elastisitas dari PAD terhadap PDRB tahun 2024 tumbuh negatif. Hal yang sama terjadi empat tahun sebelumnya, nilai negatif 0.59 elastisitas PDRB dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan elastisitas negatif 5.25. Sehingga lima tahun kedepan, untuk menjaga nilai elastisitas PAD terhadap perekonomian daerah dengan cara menjaga nilai gap kontribusi 10% minimal PAD tumbuh positif di Kabupaten Jayapura.

The research objective is to measure the elasticity of PAD with PDRB and the agriculture, forestry and fisheries sectors. Quantitative research approach, using descriptive statistical analysis method by calculating PAD elasticity ratio in 2020-2024. The results showed that the elasticity of PAD to PDRB in 2024 grew negatively. The same thing happened four years earlier, with a negative value of 0.59 elasticity of PDRB and a negative elasticity of 5.25 in the agriculture, forestry and fisheries sector. So that in the next five years, to maintain the elasticity value of PAD to the regional economy by maintaining the 10% contribution gap value, at least PAD grows positively in Jayapura Regency.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

### PENDAHULUAN

Sumber teori disampaikan Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan asal penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Halim (2008) PAD diperoleh dan dipungut daerah wajib memiliki dasar hukumnya. Isdijoso (2002) PAD sebagai akumulasi penerimaan pajak dari perusahaan milik daerah, investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Samsubar Saleh (2003) PAD komponen dapat menentukan berhasil atau tidak kemandirian pemerintah melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Selanjutnya sedikit berbeda pandangan dari Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan untuk menjadikan PAD basis penerimaan pemerintah memerlukan biaya atau pengeluaran.

Selain sumber teori, beberapa temuan empiris PAD sebagai penerimaan Kabupaten Jayapura, terkait kinerja keuangan atau keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya temuan dari Parera et.al (2024) belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah, Tappi, V.P. (2024) pemetaan asset minim kontribusinya terhadap PAD, Manalu dan Rante (2023) *Pholeuw Park* tepi danau sentani belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber pemasukan asli daerah. Kreuta dan Rofingatun (2017) PAD sudah efektif dan efisien tapi tidak mendorong kinerja keuangan otonomi daerah. Klara et.al (2019) asset dan penyertaan modal tidak berpengaruh terhadap PAD, Halomoan (2012) berhasil menghitung Rp.27.256 milyar/tahun potensi nilai produksi ikan tangkap dari danau sentani. Kekry

(2024) menemukan varians cukup tinggi tentang belanja daerah, kondisi ini dipicu oleh terbatasnya pendapatan daerah.

Kemampuan anggaran tahun 2020 untuk pendapatan daerah Rp.1.452,430 triliun, sedangkan penerimaan PAD hanya Rp.96,820 miliar, kebutuhan layanan publik tinggi sehingga belanja menembus Rp.1.293,00 miliar. Anggaran tahun 2024 untuk pendapatan daerah Rp.1.455,030 triliun, masih minim kontribusi PAD hanya Rp.84,900 miliar, sedangkan kebutuhan belanja publik mencapai Rp.1.553,900 triliun. Kondisi kemampuan APBD di Kabupaten Jayapura hingga sekarang masih dijumpai permasalahan serius, didukung temuan empiris sebelumnya rentang waktu tahun 2012-2024. Artinya secara empiris masih terjadi permasalahan dan belum berjalannya teori dari Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan asal penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah.

Sehingga, penting untuk mendapatkan pengalaman penelitian aktual tentang PAD dan sektor potensial di Kabupaten Jayapura. Pertanian, kehutanan dan perikanan sebenarnya mampu mendorong PAD, karena peranan sektor mencapai 17.78-19.39 persen dengan PDRB di Kabupaten Jayapura. Selain enam peneliti sebelumnya, permasalahan PAD dan Kinerja Keuangan umum terjadi di Provinsi Papua, misalnya dari hafizrianda et.al (2019) capaian <10 persen kemandirian keuangan daerah, artinya Papua masih tergantung pendapatan transfer pemerintah pusat, Kekry (2020) cenderung minim karena kepastian peta potensi kemampuan keuangan daerah, selanjutnya Kekry (2021) hanya 1,74 persen kemampuan PAD karena daya saing ekonomi potensial tidak terjadi, Wonar (2022) kepatuhan belanja wajib menjadi pertimbangan, mungkin disebabkan adanya kelemahan kapasitas PAD sehingga ruang gerak keuangan daerah terbatas. Selain itu juga, Ngutra (2015) pemerintah tidak melakukan pendataan potensi pertanian sebagai objek pajak, pemerintah sangat bergantung dengan BPS.

Keberadaan teori menyatakan PAD sebagai sumber penerimaan daerah, berasal dari ekonomi asli di Kabupaten Jayapura, masih menjadi topik penelitian karena potensi ekonomi tinggi tapi minim pemanfaatan pihak berkepentingan, manfaat lainnya seperti disebutkan kekry et.al (2021) penelitian dijadikan wana pembelajaran dan menguji kemampuan peneliti. Sehingga penelitian ini, mengupayakan bukti empiris tentang elastisitas PAD terhadap PDRB khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan karena kontribusinya 17.78-19.39 persen PDRB di Kabupaten Jayapura. Rumusan masalah penelitian, bagaimana perkembangan nilai elastisitas PAD terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya tujuan penelitian, memberikan kontribusi empiris terkait permasalahan kemampuan PAD dan menerapkan teori dari Halim (2004) PAD seharusnya penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli di Kabupaten Jayapura. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan cara statistik deskriptif khususnya rasio elastisitas PAD terhadap PDRB tahun 2020-2024.

## **METODE**

Bogdan & Taylor dikutip oleh Moleong (2021) metodologi merupakan mekanisme dan prinsip menemukan tantangan dan mengupayakan solusi. Lokasi penelitian di Sentani Kabupaten Jayapura, Kaur et.al (2018) pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk memahami fenomena. Kuncoro (2013) jenis data kuantitatif merupakan terhitung secara langsung penelitian ini menggunakan data PDRB 2020-2024 sumber data dari website resmi BPS Kabupaten Jayapura, sedangkan data pendapatan asli daerah (PAD) 2020-2024 diakses melalui portal APBD kementerian keuangan. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, Widodo (1999) dimana rasio elastisitas PAD terhadap PDRB dihitung melalui perbandingan Persentase Perubahan PAD terhadap Persentase Perubahan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Jayapura.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jayapura merupakan sumber penerimaan daerah, setiap tahun pada struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jayapura. Komponen utama objek PAD ialah pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. UU No.23/2014 menyebutkan PAD menjadi penerimaan daerah serta dipungut berdasarkan peraturan daerah. UU No.1/2022 pemerintah daerah diberikan kewenangan terkait daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, salah satu bentuk ukuran kewenangan ialah optimalisasi sumber keuangan daerah Kabupaten Jayapura.

***Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Sentani Kabupaten Jayapura, Hanifah Diah Indryani Rahmawati***

11

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, memberikan kontribusi empiris terkait permasalahan kemampuan PAD dan menerapkan teori dari Halim (2004) PAD seharusnya penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli, melalui perhitungan rasio elastisitas PAD terhadap PDRB tahun 2020-2024 di Kabupaten Jayapura. Untuk itu, sebaiknya memperoleh informasi mengenai keberadaan perekonomian daerah melalui informasi kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Jayapura tahun 2020-2024.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024

<b>Sektor PDRB</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	19.39	19.04	18.50	18.32	17.78
Pertambangan dan Penggalian (%)	1.34	1.32	1.25	1.23	1.21
Industri Pengolahan (%)	4.51	4.38	4.18	4.10	4.06
Pengadaan Listrik dan Gas (%)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah (%)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Konstruksi (%)	17.01	16.97	16.55	15.94	16.36
Perdagangan Besar dan Eceran (%)	13.51	13.70	14.41	14.34	14.06
Transportasi dan Pergudangan (%)	12.69	12.92	13.90	14.64	15.07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	1.20	1.19	1.14	1.12	1.14
Informasi dan Komunikasi (%)	6.54	7.01	7.15	7.40	7.29
Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	1.42	1.40	1.43	1.54	1.52
Real Estate (%)	4.99	5.44	5.18	5.26	5.04
Jasa Perusahaan (%)	2.16	2.29	2.28	2.42	2.31
Administrasi Pemerintahan (%)	9.88	8.93	8.73	8.38	8.81
Jasa Pendidikan (%)	1.89	1.79	1.81	1.92	1.88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	1.79	1.86	1.78	1.73	1.78
Jasa lainnya (%)	1.52	1.60	1.56	1.52	1.53

Sumber: Data diolah, BPS Kabupaten Jayapura Tahun 2025

Sektor PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki porsi cukup besar rata-rata 18.61 persen, sektor lainnya cukup dominan adalah konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan. Beberapa potensi sektor seharusnya menopang ekonomi makro ialah industri, karena sektor ini memiliki peluang mendapatkan peluang PAD di Kabupaten Jayapura namun masih minim hanya 4 persen, Tanudi (2021) kontribusi sektor industri semakin menunjukkan trend positif secara persentase dan nominalnya. Terdapat keyakinan bahwa pemicu adanya investasi dan ekspor mampu mendorong sektor pertanian atau perkebunan sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan PAD bagi daerah, terdapat dukungan teoritis kekry dan fahmi (2021) di kalimantan sektor perkebunan bisa menopang ekonomi daerah dan penerimaan daerah karena adanya ekspor CPO. Sehingga secara sederhana walaupun keseluruhan sektor PDRB kontribusinya positif dan cenderung naik tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi kinerja keuangan daerah, seperti temuan dari Parera dkk (2024) belum dapat diandalkan sumber pembiayaan otonomi daerah dan Tappi, V.P. (2024) pemetaan asset minim kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Jayapura.

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024

<b>Perkembangan PAD</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pendapatan (Rp Triliun)	1,452	1,220	1,396	1,438	1,455
Kontribusi PAD Untuk Pendapatan (%)	6.67	10.28	11.62	9.23	5.84
Gap Kontribusi 10% Minimal PAD	-3.33	0.28	1.62	-0.77	-4.16
Kemampuan PAD Untuk Belanja (%)	7.49	9.60	11.14	9.12	6.06

Sumber: Data diolah, Portal DJPK Tahun 2025

Sesuai semangat otonomi daerah, pemerintah memberikan kualitas layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura, namun ada tantangan keuangan daerah kekry & iriawan (2024) tingginya kebutuhan wajib layanan publik namun tidak didukung dengan pendapatan memadai, sehingga besarnya nominal pendapatan dan belanja daerah belum tentu diiringi dengan tingkat

kepatuhan belanja wajib. Seperti pendapatan daerah di Kabupaten Jayapura secara historis meningkat positif 2020-2024 namun kinerja PAD sebagai penerimaan Kabupaten Jayapura, terkait kinerja keuangan atau keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal.

Misalnya menurut Halim dan Nasir (2006) PAD diperoleh dan dipungut daerah wajib memiliki dasar hukumnya, fenomena di kabupaten jayapura hanya pemungutan PAD hanya menjawab kinerja penerimaan berdasarkan target ditentukan, namun untuk kinerja keuangan dari sisi kemandirian masih belum maksimal, karena rata-rata 8 persen kontribusi PAD untuk pendapatan Kabupaten Jayapura. Selain itu jika pemahaman dari Isdijoso (2002) bahwa PAD sebagai akumulasi penerimaan pajak dari perusahaan milik daerah, investasi dan pengelolaan sumber daya alam, hal ini tentunya melalui belanja daerah baik itu belanja modal atau pembiayaan penyertaan modal investasi ternyata masih sangat kecil juga di Kabupaten Jayapura, artinya penerimaan PAD Kabupaten Jayapura, memanfaatkan transfer pusat untuk pembiayaan pengumpulan penerimaan pajak Kabupaten Jayapura.

Tabel 3. Nilai Elastisitas PAD dan PDRB Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	PDRB (Rp Triliun)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp Miliar)	Elastisitas PDRB (%)	Elastisitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
2020	-6.62	1113.53	126.09	-0.59	-5.25
2021	28.67	1070.09	147.63	2.68	19.42
2022	36.80	1216.47	132.44	3.03	27.79
2023	-29.46	954.70	141.31	-3.09	-20.85
2024	-47.88	1213.13	113.08	-3.95	-42.34

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

terdapat berbagai event besar di Kabupaten Jayapura seperti PON papua namun tidak memberikan dampak bagi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, Kekry & Murwaniputri (2022) dampak dari PON harusnya tumbuhnya ekonomi inklusif namun faktanya pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura rata-rata Rp.17 triliun namun bukan dari sektor perdagangan atau industri, melainkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai Rp.3 triliun. Selain itu juga adanya kegiatan FDS (Festival Danau Sentani) yang dilaksanakan hampir setiap tahun, namun belum memberikan pemicu terjadinya pertumbuhan basis ekonomi potensial, untuk menjadi peluang penerimaan PAD di Kabupaten Jayapura

Salah satu implikasinya adalah elastisitas dari PAD terhadap PDRB pada tahun 2024 elastisitas PDRB tumbuh negatif begitu juga dengan elastisitas pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal yang sama terjadi empat tahun sebelumnya dimana elastisitas negatif 0.59 untuk PDRB dan negatif 5.25 pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Fenomena di Kabupaten Jayapura ternyata terjadi juga di daerah lain, misalnya Nazikha (2021) 34 daerah otonom memiliki elastisitas fiskal tidak berpengaruh untuk pertumbuhan inklusif, konfirmasi lainnya dari Hardinandar (2020) PAD dan DAU memperburuk kemiskinan di pedesaan. Sehingga penelitian ini menemukan bahwa perjalanan kinerja PAD di Kabupaten Jayapura belum sesuai dengan teori disampaikan Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah, selain itu juga kontribusi PAD untuk pendapatan selama 2020-2024 tumbuh positif, tapi tidak dengan elastisitas terhadap perekonomian khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan, penelitian ini memiliki hipotesis dimasa depan tentang kinerja PAD, untuk memperbaiki elastisitas PAD terhadap PDRB dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan maka pemerintah harus menjaga capaian nilai positif seperti tahun 2021-2022 untuk gap kontribusi 10% minimal PAD di Kabupaten Jayapura. Karena kecenderungan jika gap kontribusi tumbuh negatif maka elastisitas cenderung mengalami nilai negatif untuk PAD Kabupaten Jayapura.

## SIMPULAN

Sesuai masalah penelitian, nilai elastisitas PAD terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Jayapura, menerapkan teori PAD sebagai penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli tahun 2020-2024 di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian melalui analisis elastisitas PAD menunjukkan bahwa elastisitas dari PAD terhadap PDRB pada tahun 2024 tumbuh negatif begitu juga dengan elastisitas pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal yang sama terjadi empat tahun sebelumnya

dimana elastisitas negatif 0.59 untuk PDRB dan negatif 5.25 pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sehingga 5 tahun dimasa depan, untuk menjaga nilai elastisitas PAD terhadap PDRB dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui nilai gap kontribusi 10% minimal PAD harus tumbuh positif di Kabupaten Jayapura.

#### REFERENSI

- Halim, A. 2004. Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YPKN, Yogyakarta
- Halim, A. 2008. Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Hardinandar, F. 2020. Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal INOVASI*, 16(1), 1-10.
- Halomoan, H. 2012. Valuasi Ekonomi Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. *Ecotrophic*, 7(2),135-144.
- Hafizrianda, Y., Purbariani, I.A., & Kekry, B.P.N. 2019. Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(3),92-133.
- Isdijoso, B., & Wibowo, T. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). *Kajian Ekonomi dan keuangan*, 6(1), 22-56.
- Kusumawardani, I., Sukiman, S., & Widayaningsih, N. 2008. Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 dan 2006. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 3(1),1-10.
- Kuncoro, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Erlangga: Jakarta.
- Kurni. S.A., & Tahar, A. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118-136.
- Kreuta, B. & Rofingatun, S. 2017. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(3),1-13.
- Kaur, P., Stoltzfus, J., & Yellapu, V. 2018. Descriptive statistics. *International Journal of Academic Medicine*, 4(1), 60p.
- Klara, A., Sueni, W.F.E., Iek, M., & Indahyani, R. 2019. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Pendapat Asli Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 4(1),1-10.
- Kekry, B.P. 2020. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1),27-34.
- Khikmah, Z., Sarfiah, S.N., & Prasetyanto, P.K. 2020. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(4), 1127-1142.
- Kiagus, Z.A. 2020. Elastisitas Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Eksistensi*, 9(2).1315-1325.
- Kekry, B.P.N., & Fahmi, M. 2021. Economic Facts Of Sumatra And Kalimantan Islands For 10 Years. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11),1437-1443.
- Kekry, B.P.N., Komang, S.S., Yare, H., & Duwiri, D. 2021. Economic Student Scientific Publication Model Exploration Factor Analysis (EFA) Approach. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 1580-1587.
- Karnila, A & Ningsih, N.W. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(1), 85-101.

- Kekry, B.P.N. 2021. Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Wilayah Adat Ha Anim. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(10),1203-1210.
- K, Digidowiseiso. 2023. Analisis desentralisasi fiskal Kabupaten Bulukumba. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4428-4434.
- Kekry, B.P.N. 2022. Mandatory spending of education and health budget in Papua. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 54-63.
- Kekri, B.P.N., & Murwaniputri, H. 2022. Model Tata Kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 12-20.
- Kekry, B.P.N., & Iriawan, I. 2024. Difficulties in Realizing Regional Finance in Indonesia: Quantitative Descriptive Approach. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 29-44.
- Moleong, Lexy. (2021). *Metodologi penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Manalu, M., & Rante, H. 2023. Potensi Pengembangan Investasi Pemanfaatan Taman Kota “Pholeuw Park” Sentani, Kabupaten Jayapura. *Jurnal MEDIAN Arsitektur dan Planologi*, 13(02), 65-71.
- Ngutra, R.N., & Kekry, B.P.N. 2015. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Kajian Ekonomi & Studi Pembangunan*, 2(1), 89-102.
- Nazikha, R.S., & Rahmawati, F. 2021. Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiska daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2),120-134.
- Parera, J. R., Toatubun, N., & Yuyunita, Y. 2024. Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, 1(2), 78-87.
- Samsubar, Saleh. 2003. Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, *Media Ekonomi & Bisnis*, 13(2),1-10.
- Tanudy, A., & Syafii, M. 2021. Analisis Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Jayapura. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 1(2), 50-56.
- Tappi, V.P. 2024. Pengaruh Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 109-120.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Wonar, K., & Kekry, B.P.N. 2022. Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 7(1), 39-50.
- Widodo, S.T. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius: Yogyakarta.